

MENGURAI BENANG KUSUT PERSEPAKBOLAAN TANAH AIR

(Sebuah Kajian Kritis terhadap Realitas Perebutan Kekuasaan di Ranah Publik)

Yusuf Adam Hilman

Ilmu Pemerintahan FISIP UNMUH Ponorogo

Email: 545471adamongis@gmail.com

Abstract

Football as one of many favorite of entertainment by the people indonesia, make management practices football must be held a good based on the principles of professionalism, fairplay and also independence, it is very important to remember football need resources supporters that are large, both in any material thing and non matter, hence the involvement of various parties should have be addressed wisely, so that a sportive spirit and sincerity of steakholder should always emphasized. Conflict that appears sometimes caused by several things, for his: 1). the difference of interest between steakholder persepakbolaan land water to move could set conflict, 2). Allocation power and authority uneven, so as to make steakholder persepakbolaan in the country each other scrambling power, 3). The emergence of a powerful person who is outside system, often affect the owner rights in decision-making and decision-making, so as to make the decision and policy that has been taken is segmented oriented. he condition that is what often makes persepakbolaan land water into unstable , so that necessary step's: 1 .Conflict resolution through persuasive approach through actor's who has the authority to sit with and discuss conflict resolution , like what ever be done by the youth and roy suryo, 2) .penyelesaian conflict by the way the termination of activity persepakbolaan in total, Then forming and memproyeksiakan persepakbolaan with the the new guy and energy professionals from abroad , so that netralitasnya can be maintained, 3). Conflict resolution through revolution persepakbolaan the country, with to change the system persepakbolaan land management water and stop government interference, and fully returned to the community, with the principles of: of the people , by people for people.

Keyword: Conflicts Football, Power And Authority, With The Sacred Printing Public.

Abstraksi

Sepakbola sebagai salah satu hiburan yang banyak digandrungi oleh rakyat Indonesia, membuat praktik pengelolaansepakbola harus diselenggarakan secara baik berdasarkan asas profesionalitas, fairplay dan jugakemandirian, hal ini sangat penting mengingat sepakbola memerlukan sumberdaya pendukung yang besar, baik dalam hal materi maupun non materi, oleh karena itu keterlibatan berbagai pihak seharusnya bisa disikapi secara bijak, sehingga semangat sportifitas dan ketulusan dari steakholder harus selalu ditekankan. Konflik yang muncul terkadang disebabkan oleh beberapa hal, yakni: 1).Perbedaan Kepentingan antar steakholder persepakbolaan tanah air sehingga dapat menyulut konflik, 2). Alokasi kekuasaan dan kewenangan yang tidak merata, sehingga membuat steakholder persepakbolaan di tanah air saling berebut kekuasaan, 3). Munculnya orang kuat yang berada di luar sistem, yang sering mempengaruhi pemilik kewenangan dalam pengambilan keputusan dan pembuatan kebijakan, sehingga membuat keputusan dan kebijakan yang diambil bersifat segmented oriented. Kondisi itulah yang sering membuat

persepakbolaan tanah air menjadi tidak stabil, sehingga diperlukan langkah – langkah:1). Penyelesaian konflik melalui pendekatan persuasif melalui aktor – aktor yang memiliki kewenangan supaya dapat duduk bersama dan membicarakan penyelesaian konflik, seperti yang pernah diupayakan oleh Menpora Roy Suryo, 2). Penyelesaian konflik melalui jalan penghentian aktivitas persepakbolaan secara total, kemudian membentuk dan memproyeksikan persepakbolaan dengan orang – orang baru dan tenaga – tenaga profesional dari luar negeri, sehingga netralitasnya dapat dijaga, 3). Penyelesaian konflik melalui revolusi persepakbolaan tanah air, dengan merubah sistem pengelolaan persepakbolaan tanah air dan menghentikan campur tangan pemerintah, dan mengembalikan sepenuhnya kepada masyarakat, dengan asas: dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

Kata Kunci : Konflik Sepakbola, Kekuasaan dan Kewenangan, di Ranah Publik.

Pendahuluan

Olahraga sepakbola atau yang sering disebut *Bal –balan* oleh masyarakat etnis Jawa, merupakan salah satu jenis olahraga yang memiliki banyak penggemardiIndonesia. Hal ini disebabkan, karena olahraga sepakbola sangat dekat dengan kehidupan masyarakat, mengingat hampir di seluruh wilayah Indonesia, bisa dipastikan bahwa daerah – daerah tersebut memiliki klub sepakbola, baik yang berlaga di liga amatir hingga liga profesional. Selainitu olahraga sepakbola dianggap sebagai olahraga yang murah – meriah, karena untuk mengakses pertandingan sepakbola masyarakat tidak perlu mengeluarkan biaya yang mahal, atau harus datang ke stadion, tetapi cukup hanya dengan memiliki televisi, kita dapat menyaksikan pertandingan sepakbola, karena siaran pertandingan sepakbola bisa dinikmati melalui frakuwensi televisi lokal maupun nasional.

Kedekatan olahraga sepakbola dengan masyarakat kita, telah banyak membuat masyarakat Indonesia mencintai dan memiliki klub – klub lokal, Romantisme masyarakat Indonesia terhadap dunia sepakbola, memang begitu indah, namun demikian profil persepakbolaan di tanah air kita,tidak seindah yang dibayangkan, karena persepakbolaan di Indonesia penuh dengan konflik dan liku – liku,yang tidak kuncung menemukan ujungnya. Prahara tersebut akhirnya berdampak besar terhadap kelangsungan dan eksistensi duniapersepakbolaan tanah air.

Konflik persepakbolaan Indonesia diawali darilengsernyaketua PSSI (Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia) yaitu Nurdin Halid, kemudian digantikan dengan Djohar Arifin Husin, dalam perjalannya tersebut timbullah harapan - harapan baru, terhadap masa depan persepakbolaan yang ada di tanah air, supaya masa depan dunia persepakbolaan bisa menjadi lebih cerah dan banyak mengukir berprestasi, masyarakat juga merasa yakin bahwa sepakbola Indonesia akan bangkit dan kembali menjadi “*macan Asia*”. Hal tersebut dapat dilihat dari langkah – langkah strategis yang coba dilakukan oleh ketua PSSI yang baru

Djohar Arifin Husein, beliau merencanakan beberapa program terkait: pembinaan pemain usia muda, program sertifikasi kepelatihan untuk wasit, pembentukan kompetisi baru, pemberantasan mafia bola, menyelesaikan permasalahan kesejahteraan pemain, dan juga melakukan verifikasi terhadap aspek kelayakan tim – tim sepakbola yang akan berlaga di kompetisi amatir hingga profesional. Namun belum berjalan satu tahun kepengurusan Djohar Arifin Husein, konflik persepakbolaan di Tanah air kembali muncul, berjalan “*bak bola salju*” yang terus menggelinding di setiap saat, sehingga dapat menimpa siapa saja, dan juga apa saja yang ada didepanya, sehingga konfliknya menjadi semakin besar.

Konflik terjadi ketikaketua umum PSSI membuat sebuah keputusan yang kontroversial, hal ini kemudian memicu protes keras dari beberapa anggota Exco PSSI, saat itu, yakni: La Nyala Mataliti, Erwin Dwi Budiman, Roberto Rouw, Tony Apriliani, aksi protes tersebut kemudian ditanggapi dingin oleh ketua umum, denganmemberhentikan 4 (empat) orang anggota Exco tersebut. Beberapa keputusan kontroversial tersebut, antara lain: 1). Keputusan PSSI mengubah jumlah peserta kompetisi liga super menjadi 24 klub dari seharusnya 18 klub. 2). Memasukan klub yang bukan anggota PSSI dan klub yang tidak layak mengikuti super liga. 3). Mengganti pelaksana kompetisi dari PT. Liga Indonesia dengan PT Liga Prima Indonesia Sportindo.¹

Pemberhentian tersebut kemudian memunculkan reaksi dengan lahirnya beberapa gerakan– gerakan untuk mengkritisi kinerja ketua umum, puncak dari gerakan tersebut adalah pembentukan Komite Penyelamat Sepakbola Indonesia (KPSI) yangmenghasilkan keputusan bahwa La Nyala Mataliti terpilih sebagai ketua umum,kemudian pada hari minggu 18 Maret 2012 digelarlah kongres luar biasa (KLB) di Hotel Mercure Ancol Jakarta, dari kongres yang dilakukan tersebut, menghasilkan beberapa butir kesepakatan, yaitu: 1). Mengajukan mosi tidak percaya akan kepemimpinan Djohar Arifin Husein karena dianggap melanggar statuta PSSI dan Kongres Bali II. 2). Mencabut dukungan kepada Djohar Arifin Husein dan membekukan kepemimpinannya serta membubarkan semua anggota Exco yang masih aktif di PSSI dan mengangkat kembali anggota Exco yang dipecat oleh Djohar Arifin Husein, yakni La Nyala Mataliti, Erwin Dwi Budiman, Roberto Rouw, Tony Apriliani. 3). Melaporkan bahwa 2/3 anggota PSSI telah telah siap menjalankan *Ekstra Ordinary Congress* atau Kongres Luar Biasa (KLB). 4). Tetap menolak sanksi apapun yang dijatuhkan oleh PSSI dibawah kepemimpinan Djohar Arifin Husein. 5). Tidak menghadiri dan menganggap tidak sah kongres tahunan PSSI di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, pada 18 Maret 2012. 6).

¹<http://kompasiana.com/yahya/doang/alasanPSSI/membuat/KLB/18maret/diAncol> Diakses tanggal 19 September 2016 pukul 10.00.

Membawa permasalahan pembelotan KPSI ke Badan arbitrase olahraga Nasional. 7). Daripada menyerah dan melakukan rekonsiliasi lebih baik menerima sanksi PIPA, dengan alasan bahwa yang menerima sanksi FIFA bukan hanya pendukung KPSI namun juga seluruh anggota PSSI.²

Konflik tersebut berlanjut hingga pada level kompetisi, dimana setelah pembentukan kompetisi, ada beberapa klub sepakbola yang menolak untuk bergabung dengan kompetisi IPL di bawah kepengurusan PSSI pimpinan PSSI Djohar Arifin Husein, dan beberapa klub tersebut memilih untuk bergabung di kompetisi ISL di bawah naungan KPSI Pimpinan La Nyala Mahmud Mataliti. Dalam perjalannya, permasalahan baru kemudian muncul, dimana banyak klub yang pecah menjadi 2 (dua) atau lebih, Dualisme tersebut menjadikan beberapa klub sepakbola, memiliki kembaratau duplikat, baik dalam hal: nama klub, logo klub, dan juga memiliki pendukung atau suporter yang sama juga. Hingga pada akhirnya kompetisi IPL yang berada di naungan PSSI hanya diperkuat oleh klub – klub kecil, karena klub – klub besar memilih untuk tetap bertahan di kompetisi ISI.³

Selain itu konflik yang berkepanjangan juga diperparah dengan terjeratnya menteri pemuda dan olahraga ketika itu Andi Alfian Malaranggeng, terkait kasus korupsi wisma atlet hambalang, sehingga konflik persepakbolaan tanah air semakin tidak terurus. Kondisi tersebut kemudian menimbulkan kekhawatiran dikalangan masyarakat khususnya pecinta sepakbola, tentang masa depan persepakbolaan tanah air yang semakin suram, selain itu ada indikasi dari beberapa pengamat persepakbolaan tanah air, bahwa induk organisasi olahraga sepakbola Indonesia (PSSI) akan mendapatkan sanksi yang berat dari federasi sepakbola dunia (*Federations International Football Associations*) FIFA, sehingga bisa menimbulkan kerugian yang amat besar.

² Ibid

³<http://sport.detik.com/read/2011/11/27/019> Diakses tanggal 19 September 2016 pukul 10.00.

Gambar 1.1 Permasalahan Sepakbola Nasional



Sumber diolah dari: <http://www.google.com>

Pemerintah akhirnya mengambil langkah cepat dengan berhati – hati, melalui penunjukan Menteri Pemuda Olahraga yang baru, yaitu: Roy Suryo, yang berusaha untuk menyelesaikan konflik yang berkepanjangan, supaya persepakbolaan di Tanah Air bisa terhindar dari sanksi dan kembali pulih seperti semula. Pada awalnya banyak masyarakat yang pesimis dengan penunjukan Roy Suryo sebagai Menteri Olahraga, karena banyak kalangan yang beranggapan bahwa Roy tidak memiliki latar belakang (*background*) olahraga khususnya dibidang sepakbola.⁴

Rasa pesimistis itu ternyata secara perlahan – lahan bisa dijawab tuntas oleh Roy Suryo, karena dalam kurung waktu yang cukup singkat akhirnya, Roy Suryo mampu untuk menyelesaikan konflik persepakbolaan yang terjadi. Pemulihan persepakbola diawali dengan kembalinya 4 (empat) anggota Exco PSSI yang pada waktu itu diberhentikan, bisa kembali lagi di kepengurusan PSSI. Hal tersebut juga bisa dilihat dari sinergisitas yang dibangun antara ketua umum PSSI dengan anggota KPSI yang dahulunya bertikai.

Peleburan liga kemudian mulai dijalankan, selain itu pembenahan tim nasional Indonesia juga mulai dilakukan, mengingat tim nasional Indonesia yang sempat terpuruk ketika konflik terjadi, klub – klub sepakbola kembali dikelola dengan lebih profesional,

⁴<http://lipsus.kompas.com/topikpilihanlist> Diakses tanggal 19 September 2016 pukul 10.00.

walaupun dengan proses yang panjang, tetapi akhirnya terbentuk juga sistem kompetisi yang lebih merata dan juga adil terutama dalam hal pengelolaan keuangan klub, dimana PSSI mengeluarkan sebuah regulasi tentang tidak diperbolehkannya tim sepakbola menggunakan dana APBD untuk kegiatan operasional klub, karena pembiayaan klub sepakbola yang begitu besar jika harus memakai dana tersebut tentunya akan dapat mengganggu keuangan daerah, selain itu akan sangat rentan sekali penggunaannya karena rawan terhadap tindak pidana korupsi.

Setelah kompetisi dijalankan dengan format wilayah, klub – klub sepakbola pun kemudian mulai berbenah, mereka dituntut untuk mandiri dan tidak lagi bisa menggunakan dana APBD dan lebih mengutamakan mencari sponsor untuk pembiayaan operasional tim, pelaksanaan *Indonesian Super League* (ISL) berjalan dengan cukup baik, hingga akhirnya menghasilkan juara yaitu: Persib Bandung dan Persipura Jayapura sebagai Runner up. Setelah menyelesaikan liga, agenda yang selanjutnya akan dilakukan adalah suksesi kepemimpinan baru untuk memilih Ketua Umum PSSI. Dimana kongres tersebut akhirnya memenangkan La Nyala Mataliti sebagai ketua umum PSSI yang baru.

Stabilitas persepakbolaan di tanah air yang mulai stabil dan kondusif kemudian kembali terusik ketika terjadi *miss communications* antara pihak PSSI dengan BOPI (Badan Olahraga Profesional Indonesia), yang berseteru terkait permintaan pengunduran jadwal kompetisi yang bertajuk QNB (*Qatar National Bank*) League, yang akan resmi menjadi pengganti nama dari kompetisi ISL (*Indonesian Super League*), perdebatan tersebut terkait permasalahan – permasalahan persepakbolaan tanah air, yang dianggap belum usai oleh BOPI, yaitu: 1). Tidak diloloskannya klub Persebaya DU dan Arema Cronus terkait permasalahan Dualisme yang dianggap belum selesai, BOPI bisa merekomendasikan dengan syarat kedua tim tersebut tidak di ikut sertakan, 2). Belum terselesainya beberapa permasalahan gaji pemain, sehingga harus dilunasi dahulu oleh klubnya, 3). PSSI dituntut untuk menyelesaikan permasalahan pengaturan skor supaya kompetisi dapat maksimal pelaksanaannya. Dengan asumsi tersebut kemudian BOPI mengancam untuk tidak mengeluarkan rekomendasi pertandingan, yang digunakan sebagai salah satu kelengkapan pertandingan, aka dengan itu laga perdana QNB League terancam gagal atau tidak dapat dihelat.

Perkembangan pertikaian antara PSSI dengan BOPI tersebut, kemudian ditanggapi oleh PSSI dengan dingin, PSSI mengatakan bahwa permasalahan – permasalahan tersebut sudah selesai dan tidak perlu dibahas lagi, lalu kemudian PSSI menjalankan QNB league, dengan penuh polemik akhirnya laga perdana QNB berjalan, melihat rekomendasi dari BOPI

yang tidak di pedulikan oleh PSSI, membuat Imam Nahrowi sebagai orang nomer satu di kementrian pemuda dan olahraga menjadi geram, kemudian kemenpora mengeluarkan sanksi berupa pembekuan PSSI, surat keputusan pembekuan tersebut berbarengan dengan pelarangan pelaksanaan liga oleh pihak Kepolisian Republik Indonesia.⁵

Melihat keputusan tersebut, pada akhirnya berefek pada *mandeknya* kompetisi QNB, kemudian PSSI mengeluarkan sikap untuk menghentikan seluruh kegiatan termasuk kompetisi, karena kondisi persepakbolaan tanah air sedang mengalami *force Majeure* atau kondisi dimana adanya kejadian luar biasa (*extraordinary circumestane*) diluar kontrol para pihak yang membuat gagalnya suatu pemenuhan kewajiban⁶

Tidak terlaksananya liga akhirnya banyak merugikan semua pihak, mulai dari manajemen tim sepakbola, pemain sepakbola, suporter sepakbola, perangkat pertandingan, tukang parkir, penjual merchandise dan lain sebagainya, sebagai pihak – pihak yang menggantungkan hidup dari industri bola. Efek yang ditimbulkan dari pembekuan tersebut ternyata sangat dahsyat, banyak pemain sepakbola yang beralih profesi demi mencukupi kebutuhan sehari – hari, banyak pemain muda yang mengubur impiannya untuk bisa berlaga di kasta tertinggi sepakbola tanah air, hingga tidak adanya hiburan bagi masyarakat menengah ke bawah yang memiliki keterbatasan untuk mengakses kebutuhan akan hiburan yang murah.

Upaya penyelesaian konflik sebenarnya sudah banyak dilakukan oleh beberapa pihak, namun pada akhirnya buntu dan tidak menemui jalan keluar, sehingga selalu saja gagal, tidak hanya itu kedua belah pihak yang bertikai selalu saja bersikeras dengan pendapatnya masing - masing, sehingga konflik pun berjalan menggelinding, hingga terjadi puncak konflik ketika secara resmi FIFA menjatuhkan sanksi terhadap Indonesia (*Bend*), FIFA beranggapan bahwa pemerintah Indonesia tidak boleh ikut campur terhadap federasi persepakbolaan di Indonesia, mengingat PSSI merupakan federasi olahraga yang menjunjung tinggi semangat *fair play* dan juga sportifitas, sehingga harus dijaga netralitasnya, dan tidak boleh dicampuradukan dengan kepentingan politik, dan ekonomi. Sanksi yang dijatukan kepada PSSI berakibat pada pembatalan semua agenda Internasional yang diikutinya, kecuali pelaksanaan Agenda U –21 yang akan mengikuti kualifikasi piala dunia, dari pembatalan keikutsertaan PSSI dalam beberapa ajang internasional menambah deretan keterpurukan persepakbolaan yang ada tanah air. Pemerintah melalui Kementrian pemuda dan olahraga

⁵<http://Aristopangaribuan.wordpress.com/2015> Diakses tanggal 19 September 2016 pukul 10.00.

⁶ <http://kompasiana.com/hr76211/liga-stop-apa-PSSI-peduli-dengan-nasibklub> Diakses tanggal 19 September 2016 pukul 10.00.

kemudian masih saja berkilah, bahwa federasi sekelas FIFA juga sedang dipertanyakan integritasnya, karena terkait kasus suap yang sedang menjerat para petingginya, bahkan menteri pemuda berencana akan membuat federasi tandingan.

Situasi persepakbolaan Indonesia yang semakin memanas, disikapi oleh pemerintah Indonesia dengan membentuk tim penyelamat sepakbola, yang melibatkan tokoh – tokoh persepakbolaan tanah air, dimana tokoh – tokoh tersebut akan menyelenggarakan kongres luar biasa untuk membentuk dan menjalankan liga, dengan tujuan untuk mengisi kekosongan kompetisi di tanah air. Akan tetapi beberapa klub sepakbola yang memiliki hak suara menolak hal tersebut, karena mereka beranggapan bahwa induk organisasi mereka adalah PSSI bukan Kementrian Olahraga, sehingga dari pertentangan tersebut kembali memperpanjang konflik persepakbolaan kita.

Kekosongan kompetisi kemudian dimanfaatkan oleh promotor sepakbola untuk mengadakan berbagai turnamen, dengan tujuan meramaikan geliat persepakbolaan tanah air, kompetisi – kompetisi tersebut memberikan banyak manfaat bagi klub – klub sepakbola, minimal dengan adanya kompetisi tersebut, manajemen klub bisa menghidupi pemain dan official yang menggantungkan hidup dari kegiatan persepakbolaan.

PSSI juga tidak tinggal diam, setelah dibekukan oleh kementrian pemuda dan olahraga, kemudian mengambil langkah hukum dengan melakukan gugatan terhadap putusan kementrian pemuda dan olahraga ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), kemudian setelah beberapa kali persidangan kemudian diputuskan bahwa Pembekuan PSSI gagal demi hukum, sehingga segala bentuk aktifitas sepakbola, khususnya terkait tugas pokok dan fungsi PSSI bisa dijalankan kembali, PSSI melalui juru bicaranya kemudian berstatemen bahwa akan menjalankan QNB pada bulan Oktober, sehingga kompetisi akan dilanjutkan, sedangkan pihak kementerian olahraga akan mengajukan banding terhadap keputusan tersebut, sehingga konflik ini diprediksi akan memulai babak baru.⁷

Prahara konflik persepakbolaan ditanah air yang begitu *ajeg* terjadi, membuat semua lapisan masyarakat berasumsi bahwa, konflik yang terjadi tidak hanya sekedar permasalahan *si kulit bundar*, tetapi juga terkait dnegan permasalahan perebutan kekuasaan, sehingga nuansa politis terasa kental dalam konflik tersebut. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa politisi yang ada dibalik layar, dengan memberikan dukungan moril dan materil

⁷<http://antaranews.com/berita/505457/pssi-siap-jalankan-kembali-kompetisi-ISL> Diakses tanggal 19 September 2016 pukul 10.00.

terhadap stakeholder sepakbola tanah air, yang memiliki kewenangan untuk mengelola sepakbola.

Kewenangan yang dimiliki oleh para pejabat baik yang duduk sebagai anggota Exco PSSI, maupun yang berada di kementerian pemuda dan olahraga, merupakan sebuah kewenangan yang sama – sama memiliki keabsahan (*legimate power*), sehingga konflik yang sedang terjadi, memang sekilas terlihat sebagai bentuk pertarungan kewenangan, akan tetapi melihat intensitas konflik yang sering terjadi dan berkepanjangan, jika kita cermati lebih mendalam sebenarnya terdapat beberapa aktor di balik panggung yang tidak terlihat, namun mereka memiliki kekuasaan, yang mampu mempengaruhi keputusan dari pihak – pihak yang memiliki kewenangan tersebut, atau dengan kata lain ada orang kuat yang mencoba mempengaruhi, segala bentuk keputusan ataupun kebijakan yang dibuat oleh PSSI dan juga Kementerian Pemuda dan Olahraga, sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dari sistem politik dan pemerintahan di Indonesia, untuk mendapatkan kekuasaan, sehingga kepentingan – kepentingan itulah yang bermain didalam konflik tersebut. Selain adanya kepentingan yang bersebrangan, terkadang konflik timbul karena ketidakmerataan pembagian dan alokasi kekuasaan, sehingga polemik sepakbola di tanah air, seringkali dijumpai dimana pemerintah mengeluarkan sebuah kebijakan yang berganti – ganti, sehingga konflik mudah sekali datang dan bisa saja seketika menghilang tanpa kabar, hal ini karena adanya nilai – nilai yang diperjuangkan.

Pembagian (*distribution*) dan alokasi (*allocations*) ialah pembagian dan penjabaran nilai – nilai (*value*) dalam masyarakat. sarjana yang menekankan pembagian dan alokasi beranggapan bahwa politik tidak lain dan tidak bukan adalah membagikan dan mengalokasikan nilai – nilai secara mengikat. Yang ditekankan oleh mereka adalah bahwa pembagian ini sering tidak merata dan karena itu menyebabkan permasalahan. Masalahnya tidak meratanya pembagian nilai – nilai perlu diteliti dalam hubungannya dengan kekuasaan dan kebijakan pemerintah.⁸

Kekuasaan disini didefinisikan sebagai kemampuan seseorang atau suatu kelompok untuk mempengaruhi perilaku seseorang atau kelompok lain, sesuai dengan keinginan para pelaku.⁹ sedangkan sarjana yang melihat kekuasaan inti dari politik beranggapan bahwa, politik adalah semua kegiatan yang menyangkut masalah memperebutkan dan

⁸Meriam Budiarto. Dasar – dasar Ilmu Politik edisi revisi. Jakarta. Gramedia Pustaka. 2008. Hal 21.

⁹Ibid. Hal 17 – 18.

mempertahankan kekuasaan. Biasanya dianggap bahwa perjuangan kekuasaan (*power struggle*) ini mempunyai tujuan yang menyangkut kepentingan seluruh rakyat¹⁰

Pembahasan

Kekuasaan

Dalam perbendaharaan ilmu politik terdapat sejumlah konsep yang berkaitan erat dengan konsep kekuasaan (*power*), seperti: *influence* (pengaruh), persuasi (*persuasion*), manipulasi, *coercions*, *force*, dan *Autority* (kewenangan).....*Influence* adalah kemampuan untuk mempengaruhi orang lain agar mengubah sikap dan prilakunya secara sukarela. Yang dimaksud dengan *Persuasions* ialah kemampuan meyakinkan orang lain dengan argumentasi untuk melakukan sesuatu. Pengertian *coersion* ialah peragaan kekuasaan atau ancaman paksaan yang dilakukan oleh seseorang oleh kelompok atau pihak lain agar sikap dan berperilaku sesuai dengan kehendakpihak pemilik kekuasaan, termasuk sikap dan berperilaku yang bertentangan dengan kehendak yang dipengaruhi.*Force* ialah penggunaan tekanan fisik, seperti membatasi kebebasan, menimbulkan rasa skit ataupun membatasi pemenuhan kebutuhan biologis terhadap pihak lain agar melakukan sesuatu.¹¹

Menurut Barbara Goodwin¹² kekuasaan susuatu kemampuan untuk mengakibatkan seseorang bertindak dnegan cara yang oleh yang bersangkutan tidak akan dipilih, seandainya ia tidak dilibatkan. Dengan kata lain memaksa seseorang untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kehendaknya (*Force is the ability to cause someone to act in a way which she whould not choice, left to herself. In other words to force someone to do something against her will*).

Esensi dari kekuasaan adalah hak mengadakan sanksi.cara untuk menyelenggarakan kekuasaan berbeda – beda. Upaya yang paling ampuh adalah kekerasan fisik (*force*). Seseorang yang bersenjatakan clurit yang memaksa seseorang untuk meyerahkan miliknya nerupakan suatu contoh dari kekuasaan yang paling terbuka dan brutal. Kekuasaan dapat jugadiselenggarakan lewat koersi (*ceorcion*), yaitu melalui ancaman akan diadakan sanksi. Suatu upaya yang sedikit lebih lunak adalah melalui persuasi (*persuasion*) yaitu proses meyakinkan , berargumentasi, atau menunjuk pada pendapat seorang ahli (*expert advice*).

¹⁰ Ibid. Hal 18.

¹¹Ramlan Surbakti.Memahami Ilmu Politik. Jakarta. PT Grasindo.2010. Hal 71-71.

¹²Meriam Budiarjo. Dasar – dasar Ilmu Politik edisi revisi. Jakarta. Gramedia Pustaka. 2008. Hal 60 – 61.

Dalam kehidupan sehari – hari seorang pelaku berkuasa kadang – kadang cenderung memakai cara ini agar tidak terlalu menonjolkan kekuasaannya.¹³

Dalam setiap situasi, terkait hubungan kekuasaan terdapat tiga unsur. Penting, yaitu: tujuan, cara penggunaan sumber – sumber pengaruh, dan hasil penggunaan sumber – sumber pengaruh. *Pertama*, kekuasaan merupakan hubungan antar manusia. *Kedua* kekuasaan merupakan mempengaruhi pihak lain. *Ketiga*, pemegang kekuasaan dapat seorang individu, kelompok, organisasi, ataupun pemerintah (negara dalam hubungan luar negeri). *Keempat*, sasaran kekuasaan (yang dipengaruhi) dapat berupa individu, kelompok organisasi atau pemerintah (negara). *Kelima*, suatu pihak yang memiliki sumber kekuasaan belum tentu mempunyai kekuasaan karena bergantung pada kemampuannya menggunakan sumber kekuasaan secara efektif. *Keenam*, penggunaan sumber – sumber kekuasaan mungkin melibatkan paksaan, konsensus, atau kombinasi keduanya. *Ketujuh*, hal ini bergantung pada perspektif moral yang digunakan, yakni apakah tujuan yang hendak dicapai itu baik atau buruk?. *Kedelapan*, hasil sumber – sumber pengaruh itu dapat menguntungkan seluruh masyarakat atau dapat juga hanya menguntungkan kelompok masyarakat kecil. *Kesembilan*, pada umumnya kekuasaan politik mempunyai makna bahwa sumber – sumber itu digunakan dan dilaksanakan untuk masyarakat umum, sedangkan kekuasaan politik yang bersifat pribadi cenderung digunakan untuk kepentingan sebagian kecil masyarakat. *Kesepuluh*, kekuasaan yang beraspek politik merupakan penggunaan sumber – sumber pengaruh untuk mempengaruhi proses politik.¹⁴

Terkait dengan sumber – sumber kekuasaan ada dua istilah yaitu: *Scope of Power* dan *Domain of Power*. Cakupan kekuasaan (*Scope of Power*) menunjuk pada kegiatan, perilaku, serta sikap, dan keputusan – keputusan yang menjadi obyek kekuasaan. Misalnya, seorang direktur perusahaan mempunyai kekuasaan untuk memecat seseorang karyawan (asal sesuai dengan ketentuan yang berlaku), akan tetapi tidak mempunyai kekuasaan terhadap karyawan di luar hubungan kerja ini. Istilah wilayah kekuasaan (*Domain of Power*), menjawab pertanyaan siapa – siapa saja yang dikuasai oleh orang atau kelompok yang berkuasa. Jadi menunjuk pada pelaku, kelompok organisasi atau kolektivitas yang kena kekuasaan. Misalnya, seorang direktur perusahaan mempunyai kekuasaan atas semua karyawan dalam perusahaan itu, baik yang dipusat, maupun yang dicabang – cabang.¹⁵

¹³Ibid. Hal 61.

¹⁴Ramlan Surbakti. Memahami Ilmu Politik. Jakarta. PT Grasindo. 2010. Hal 73-74.

¹⁵Meriam Budiarjo. Dasar – dasar Ilmu Politik edisi revisi. Jakarta. Gramedia Pustaka. 2008. Hal 62.

Didalam praktiknya kekuasaan memiliki dimensi, yang dapat dirumuskan sebagai berikut¹⁶:

1). Potensi dan Aktual

Seseorang dipandang mempunyai kekuasaan potensial apabila dia memiliki sumber – sumber kekuasaan, seperti kekayaan, tanah, senjata, pengetahuan dan informasi, popularitas, status sosial yang tinggi, massa yang terorganisasi, dan jabatan. Sebaliknya, seseorang dipandang memiliki kekuasaan aktual apabila dia telah menggunakan sumber – sumber yang dimilikinya kedalam kegiatan politik secara efektif (untuk mencapai tujuan).

2). Konsensus dan Paksaan

Penganalisisan politik yang menekankan aspek paksaan dari kekuasaan akan cenderung memandang politik sebagai perjuangan, pertentangan, dominasi, dan konflik. Sementara itu, alasan untuk menaati kekuasaan konsensus pada umumnya berupa persetujuan secara sadar dari pihak yang dipengaruhi.

3). Positif dan Negatif

Tujuan pemegang kekuasaan adalah untuk mendapat ketaatan atau penyesuaian diri dari pihak yang dipengaruhi. Tujuan umum ini dikelompokkan menjadi dua aspek yang berbeda, yaitu: tujuan positif dan negatif. yang dimaksud dengan kekuasaan positif ialah penggunaan sumber – sumber kekuasaan untuk mencapai tujuan yang dipandang penting dan diharuskan, sedangkan kekuasaan negatif ialah penggunaan sumber – sumber kekuasaan untuk mencegah pihak lain mencapai tujuannya yang tidak hanya dipandang tidak perlu, tetapi juga merugikan pihaknya.

4). Jabatan dan Pribadi

Pada masyarakat maju dan mapan baik jabatan maupun kualitas pribadi yang menduduki jabatan merupakan sumber kekuasaan. Sebaliknya, pada masyarakat yang sederhana struktur masyarakat kekuasaan yang didasarkan atas kualitas pribadi tampak lebih menonjol daripada kekuasaan yang terkandung dalam jabatan.

5). Implisit dan Eksplisit

Kekuasaan implisit ialah pengaruh yang tidak dapat dilihat, tetapi dapat dirasakan, sedangkan kekuasaan eksplisit ialah pengaruh yang secara jelas terlihat dan terasakan.

6). Langsung dan Tidak Langsung

Kekuasaan langsung ialah penggunaan sumber – sumber untuk mempengaruhi pembuat dan pelaksana keputusan politik dengan melakukan hubungan secara langsung, tanpa

¹⁶Ibid. Hal 63.

melalui perantara. Sedangkan kekuasaan tidak langsung ialah penggunaan sumber – sumber untuk mempengaruhi pembuat dan pelaksana keputusan politik melalui perantara pihak lain yang diperkirakan mempunyai pengaruh yang lebih besar terhadap pembuat dan pelaksana keputusan politik.

Terkait dengan pelaksanaan kekuasaan politik atau penggunaan sumber – sumber, terdapat empat faktor yang perlu dikaji, antara lain¹⁷:

1). Bentuk dan Jumlah sumber

Yang termasuk dalam kategori sumber kekuasaan ialah sarana paksaan fisik, kekayaan, harta benda (ekonomi), normati, jabatan, keahlian, informasi, status sosial, popularitas pribadi, dan massa yang terorganisasi. Senjata tradisional, senjata konvensional, senjata modern, penjara, kerja paksa, teknologi, dan aparat yang menggunakan senjata – senjata ini merupakan sejumlah contoh sarana paksaan fisik.

2). Distribusi sumber dalam masyarakat

Sumber – sumber kekuasaan tidak pernah didistribusikan secara merata dalam setiap masyarakat atau sistem politik karena kemampuan setiap orang bervariasi. Ketidakmampuan seseorang mungkin diciptakan oleh orang lain tetapi mungkin juga disebabkan yang bersangkutan tidak lagi memiliki semangat untuk mengubah nasib.

3). Penggunaan sumber – sumber

Setidaknya – tidaknya ada tiga pilihan bagi setiap orang atau kelompok dalam menggunakan sumber kekayaan. Pertama, menggunakan sumber itu ke dalam kegiatan non politik, seperti berbelanja, memberikan sumbangan kepada yayasan sosial, membantu orang yang tidak mampu dan memberikan sumbangan sosial lainnya. Kedua, menginvestasikan sumber itu ke bank dan dunia usaha (perdagangan, industri, dan jasa) atau membeli rumah, tanah, dan barang – barang berharga (misalnya emas). Ketiga, menggunakan sumber itu untuk mempengaruhi proses politik baik dalam hal menjagokandidat tertentu sebagai pemimpin politik dan pemerintahan maupun dalam hal memperjuangkan kebijakan tertentu yang menguntungkan.

4). Hasil penggunaan sumber – sumber

Hasil penggunaan sumber – sumber adalah jumlah individu yang dapat dikendalikan oleh pemegang kekuasaan, sektor – sektor kehidupan yang dikendalikan oleh pemegang kekuasaan dan kedalaman pengaruh kekuasaan terhadap individu dan masyarakat.

¹⁷Ramlan Surbakti. Memahami Ilmu Politik. Jakarta. PT Grasindo. 2010. Hal 81 - 90.

Menurut Andrain¹⁸, Ilmu politik biasanya menggambarkan distribusi kekuasaan dalam bentuk tiga model, yakni model elite yang memerintah, model pluralis, dan model populis. Model pertama melukiskan dimana distribusi dimiliki oleh kelompok kecil orang yang disebut elite. Model pluralis menggambarkan kekuasaan dimiliki oleh berbagai kelompok sosial dalam masyarakat dan berbagai lembaga dalam pemerintah. Lalu model populis melukiskan kekuasaan sebagai hak dan dipegang oleh setiap individu warga negara atau rakyat secara kolektif.

Konflik persepakbolaan di Indonesia yang tak kunjung usai, ternyata banyak menyimpan rahasia, dimana dalam konsep tersebut terdapat beberapa permasalahan pelik, diantaranya adanya pertarungan kekuasaan, antara pihak –pihak yang tidak berada didalam atau diluar sistem, namun memiliki pengaruh yang kuat, sehingga segala keputusan yang dibuat oleh pihak yang berwenang yaitu Kemenpora dan PSSI selalu saja bersebrangan, sehingga sering sekali menimbulkan permasalahan.

Problematika sepakbola di tanah air, bukan hanya permasalahan kelembagaan, namun lebih luas permasalahan tersebut merupakan pertarungan antar partai politik yang berkuasa saat ini, yaitu: 1). Kementerian olahraga yang di indikasikan memiliki hubungan dengan partai PDI – P, dimana ada beberapa tokoh yang dirasakan memiliki peranan penting terhadap langkah yang diambil oleh Imam nahrawi, seperti: Arifin Panigoro dan juga Saleh Mukkadar yang sama – sama merupakan politisi dari partai PDI-P, dan juga terkait dengan Persebaya 1927, sehingga beberapa keputusannya terkadang dirasakan tidak netral, sedangkan orang – orang yang berada di organisasi PSSI memiliki indikasi kuat memiliki hubungan spesial dengan para pengusaha dari partai Golkar, seperti Nirwan Bakrie dan Nurdin Halid, perlu diketahui bahwa Nirwan Bakri merupakan adik kandung dari Aburizal Bakri ketua umum partai Golkar, yang memiliki beberapa saham di beberapa klub sepakbola, Seperti Arema Cronus, dan Pelita Jaya, hal inilah yang membuat kedua belah pihak tidak bisa dipertemukan, karena memiliki kepentingan yang berbeda. Dalam menanamkan pengaruh orang – orang yang memiliki kewenangan, dipengaruhi dengan pemberian sumber –sumber kekuasaan, sehingga tidak heran jika pembiayaan liga atau kompetisi tandingan bisa dengan mudah dilakukan, karena pihak yang mempengaruhi memiliki sumber – sumber kekuasaan, seperti: jabatan, uang, barang dan lain sebagainya.

Walaupun PSSI dan Kemenpora memiliki kewenangan dalam hal kepengurusan olahraga, tetapi perlu diketahui bahwa kewenangan yang dimiliki merupakan alat untuk

¹⁸ Ibid. Hal 94.

mencapai kepentingan pribadi dan kelompoknya, karena hal tersebut menyangkut dengan apayang menjadi orientasi kelompok tersebut, sehingga kewenangan itu akan menjadi senjata bagi masing – masing kelompok untuk mempertahankan kekuasaan di dunia persepakhoban tanah air.

Kewenangan (Authority) dan Lagitimasi (Legitimacy)

Menurut Max Weber¹⁹ ada tiga jenis atau macam wewenang, yaitu: Tradisional, kharismatik, dan rasional legal. Wewenang tradisional berdasarkan kepercayaan diantara anggota masyarakat bahwa tradisi lama serta kedudukan kekuasaan yang dilandasi oleh tradisi itu adalah wajar dan patut dihormati. Wewenang kharismatik berdasarkan kepercayaan anggota masyarakat pada kesaktian dan kekuatan mistis atau religius seorang pemimpin. Wewenang rasional – legal berdasarkan kepercayaan pada tatanan hukum rasional yang melandasi kedudukan seseorang pemimpin yang ditekankan bukan orangnya tetapi aturan – aturan yang mendasari tingkah lakunya.

Kewenangan adalah kekuasaan. Namun, kekuasaan tidak selalu berupa kewenangan, kedua bentuk pengaruh ini dibedakan dalam keabsahannya. Kewenangan merupakan kekuasaan yang memiliki keabsahan (*legitimate power*). Sedangkan kekuasaan tidak selalu memiliki keabsahan.²⁰ Sebagai konsep hukum publik, wewenang (*Bevoegdheid*) didiskripsikan sebagai kekuasaan hukum (*Rechsmatch*) dimana konsep tersebut diatas, berhubungan pula dalam pembentukan *besluit* (keputusan pemerintah) yang harus didasarkan oleh suatu kewenangan.²¹

Legitimasi (*Legitimacy*) atau keabsahan adalah keyakinan anggota – anggota masyarakat bahwa wewenang yang ada pada seseorang, kelompok, atau penguasa adalah wajar dan patut dihormati. Kewajaran ini berdasarkan persepsi bahwa pelaksanaan wewenang itu sesuai dengan asas – asas dan prosedur yang sudah diterima secara luas dalam masyarakat dan sesuai dengan ketentuan – ketentuan dan prosedur yang sah.²²

¹⁹ Meriam Budiarto. Dasar – dasar Ilmu Politik edisi revisi. Jakarta. Gramedia Pustaka. 2008. Hal 62.

²⁰Ramlan Surbakti.Memahami Ilmu Politik. Jakarta. PT Grasindo. 2010. Hal 108.

²¹ Philipus M. Hadjhon. Pengantar hukum Administrasi Indonesia - *Introduction to Indonesian Administrative Law*. Yogyakarta. Gadjah Mada University Press. 2002.H 1.

²²Meriam Budiarto. Dasar – dasar Ilmu Politik edisi revisi. Jakarta. Gramedia Pustaka. 2008. Hal 64 - 65.

Sumber kewenangan, ada beberapa, yaitu:²³*Pertama*, hak memerintah berasal dari tradisi. Artinya, kepercayaan yang telah berakar dipelihara secara terus – menerus dalam masyarakat. Kepercayaan yang mengakar ini berwujud keyakinan, bahwa yang ditakdirkan menjadi pemimpin masyarakat ialah dari keluarga tertentu, dan yang dianggap memiliki “darah biru”.*Kedua*, hak memerintah berasal dari Tuhan, Dewa, atau Wahyu. Atas dasar itu, hak memerintah dianggap bersifat sakral. *Ketiga*, hak memerintah berasal dari kualitas pribadi sang pemimpin, baik penampilannya yang agung dan diri pribadinya yang populer maupun memiliki karisma. Pemimpin karismatik adalah seorang yang memiliki kualitas pribadi sebab mendapat “anugrah istimewa” dari kekuatan supernatural sehingga menimbulkan pesona dan daya tarik bagi anggota masyarakat. *Keempat*, hak memerintah masyarakat berasal dari peraturan perundang – undangan yang mengatur prosedur dan syarat – syarat menjadi pemimpin pemerintah. *Kelima*, hak memerintah berasal dari sumber yang bersifat instrumental seperti keahlian dan kekayaan. Keahlian yang dimaksud terletak pada keahlian dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Kekayaan yang dimaksud ialah pemilikan uang, tanah, barang – barang berharga, surat – surat berharga sarana dan alat produksi.

Teori Sistem Politik

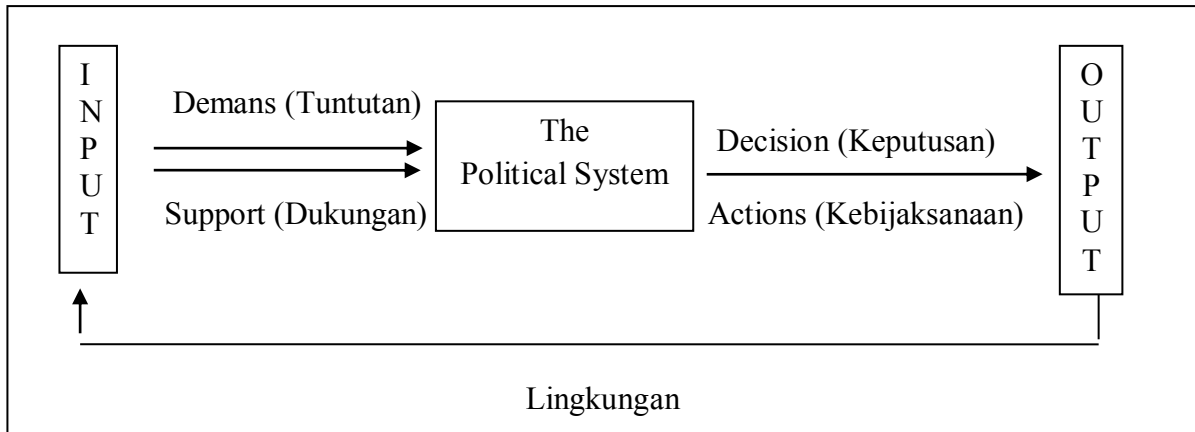
Konflik yang sedang dialami persepakbolaan tanah air, merupakan fenomena yang wajar dan sering juga terjadi di beberapa negara, mengingat di Indonesia memiliki sistem tata kelola persepakbolaan tanah air, yang masih dilakukan secara tradisional, sehingga kepemilikan klub sepakbola masih terkait dengan pihak – pihak lain, seperti: kehidupan politik, ekonomi, dan juga aktivitas lainnya, yang memiliki sumber – sumber kekuasaan, karena pengelolaan sepakbola memerlukan biaya yang besar dan juga jaringan yang luas.

Perkembangan persepakbolaan itu akhirnya menyebabkan pengelolaan sepakbola pada akhirnya melibatkan banyak pihak, yang memiliki orientasi kepentingan yang berbeda – beda, sehingga perbedaan kepentingan terkadang bisa menimbulkan konflik, oleh karena itucampur tangan pihak – pihak yang memiliki kepentingan, pada akhirnya mempengaruhi kebijakan para *steakholder* / pembuat kebijakan dalam memutuskan arah pembangunan sepakbola, sehingga seringkali mengalami pertentangan, dan kebuntuan.

Fenomena kisruh persepakbolaan di Indonesia dapat dijelaskan dalam teori sistem *David Easton*, seperti gambaran berikut ini:

²³ Ramlan Surbakti. Memahami Ilmu Politik. Jakarta. PT Grasindo. 2010. Hal 109 - 111.

Bagan 1 Teori sistem Politik David Easton



Sumber: diolah dan tambahkan dari David Easton, *A System Analysis of Political Life*. New York. Jhon Wiley 1965. Hal 32.²⁴

Sistim politik adalah suatumekanisme atau prosedur yang merupakan aturan main dan harus ditempuh dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, selain itu juga merupakan perjuangan untuk mendapatkan, dan mengadakan pembagian kekuasaan, maupun pengambilan kebijakan atau melakukan aktivitas politik baik dari penguasa dengan rakyat maupun sebaliknya.

Dari definisi tersebut maka sistem politik terkait erat dengan permasalahan, sebagai berikut: kekuasaan, kepentingan, kebijakan, dan budaya politik. Kekuasaan dalam konflik sepakbola ini, menjelaskan bagaimana sumber – sumber ekonomi dari potensi pengembangan sepakbola bisa dimanfaatkan untuk kemajuan persepakbolaan nasional. Kepentingan dalam permasalahan sepakbola di Indonesia menjelaskan tentang tujuan-tujuan yang hendak dicapai oleh kelompok – kelompok tertentu. Kebijakan dalam konflik sepakbolamerupakan hasil dari interaksi kekuasaan dan kepentingan yang konkritnya berupa kebijakan dalam bentuk perundang-undangan, untuk kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu. Budaya politik dalam konflik persepakbolaan tanah air, yaitu orientasi atau tujuan subjektif dari individu terhadap sistem politik dan persepakbolaan tanah air.

Jika kita uraikan proses dalam sistem politik, terkait dengan pembuatan kebijaksanaan atau keputusan dibidang sepakbola, terkadang terjadi melalui proses yang panjang, dimana terdapat input yang terdiri dari pihak – pihak seperti pelaku sepakbola, PSSI, Kemenpora, masyarakat, yang mengusung berbagai kepentingan, dimana nantinya keputusan tersebut akan berproses, melahirkan tuntutan dan dukungan terhadap kebijakan yang akan dibuat, disinilah kemudian muncul konflik – konflik yang melibatkan orang – orang yang ada

²⁴ Meriam Budiarmo. *Dasar – dasar Ilmu Politik* edisi revisi. Jakarta. Gramedia Pustaka. 2008. Hal 77

di luar sistem atau lingkungan yang ada diluar, orang – orang tersebut memiliki kekuasaan dan bisa mempengaruhi orang – orang yang memiliki kewenangan, sehingga keputusan ataupun kebijaksanaan dipandang sebagai sebuah kebijakan yang relatif, tergantung sudut pandang mana melihat hal tersebut, jika terjadi banyak pertentangan, berarti hal tersebut merupakan permasalahan kepentingan kelompok yang memiliki orientasi tertentu.

Penutup

Prahara persepakbolaan tanah air menjadikan perkembangan sepakbola Indonesia menjadi tidak jelas, selain itu kondisi tersebut menjadikan masyarakat putus asa dan pesimis terhadap masa depan persepakbolaan, hal ini menandakan bahwa pemerintah tidak mampu mengendalikan atau gagal menjalankan fungsinya dalam hal pembangunan persepakbolaan tanah air, ada beberapa langkah yang bisa diambil oleh PSSI maupun pemerintah, yaitu: 1). Penyelesaian konflik melalui pendekatan persuasif aktor – aktor yang memiliki kekuasaan dan kewenangan supaya dapat duduk bersama dan membicarakan penyelesaian konflik tersebut, seperti yang pernah dilakukan oleh Menpora Roy Suryo, 2). Penyelesaian konflik melalui jalan penghentian aktivitas persepakbolaan secara total, kemudian membentuk dan memproyeksikan persepakbolaan dengan orang – orang baru dan tenaga – tenaga profesional dari luar negeri, sehingga netralitasnya dapat dijaga, 3). Penyelesaian konflik melalui revolusi persepakbolaan tanah air, dengan merubah sistem pengelolaan persepakbolaan tanah air dan menghentikan campur tangan pemerintah, dan mengembalikan sepenuhnya kepada masyarakat, dengan asas: dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

Daftar Pustaka

- Meriam Budiarmo. Dasar – dasar Ilmu Politik edisi revisi. Jakarta. Gramedia Pustaka. 2008.
- Philipus M. Hadjoh. Pengantar hukum Administrasi Indonesia - *Introduction to Indonesian Administrative Law*. Yogyakarta. Gadjah Mada University Press. 2002.
- Ramlan Surbakti. Memahami Ilmu Politik. Jakarta. PT Grasindo. 2010.
- <http://www.google.com>
- <http://kompasiana.com/yahya/doang/alasanPSSI/membuat/KLB/18maret/diAncol>
- <http://sport.detik.com/read/2011/11/27/019>
- <http://lipsus.kompas.com/topikpilihanlist>
- <http://Aristopangaribuan.wordpress.com/2015>
- <http://kompasiana.com/hr76211/liga-stop-apa-PSSI-peduli-dengan-nasibklub>
- <http://antaranews.com/berita/505457/pssi-siap-jalankan-kembali-kompetisi-ISL>